

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. LATAR BELAKANG MASALAH**

Membahas mengenai isu wanita, harus dimulai dari pengertian gender, yang menurut Mansour Fakih dalam bukunya yang berjudul “Analisis Gender dan Transformasi Sosial” adalah suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksi secara sosial maupun kulratal (Fakih, 1996). Misalnya bahwa perempuan dikenal lemah lembut, cantik, emosional, atau keibuan. Sedangkan laki-laki dikenal dengan pencirian difat kuat, rasional, jantan, perkasa. Padahal sifat-sifat tersebut dapat dipertukarkan satu sama lain. Ada wanita yang mempunyai sifat maskulin, dan ada laki-laki yang mempunyai sifat feminine. Hal tersebut berbeda-beda antar waktu dan tempat dimana norma berkembang dalam masyarakat.

Dari sini muncul gagasan mengenai apa yang pantas dilakukan oleh pria maupun wanita. (Noerdin, 2006). Isu wanita muncul dikarenakan adanya budaya patriarki, seperti yang tertuang dalam *Oxford Advanced Learner’s Dictionary* menyebutkan bahwa patriarki adalah *asociety, a system, or a country that is ruled or controlled by men.*

Dimana setiap kekuasaan dalam masyarakat yang menganut sistem patriarki dikontrol oleh pria. Wanita hanya memiliki sedikit pengaruh dalam masyarakat atau bisa dikatakan tidak memiliki hak pada wilayah-wilayah umum

dalam masyarakat. Mereka secara ekonomi, sosial, politik, dan psikologi tergantung pada pria, khususnya dalam institusi pernikahan. Sehingga dalam keluarga maupun masyarakat wanita diletakkan pada posisi subordinat atau *inferior*.

Menurut Dr Susan Madsen pekerjaan wanita hanya pada wilayah domestik, mengurus suami, menjadi ibu dengan mengurus anak-anaknya. Peran-peran domestik tersebut dilekatkan pada sosok wanita oleh masyarakat yang menganut sistem patriarki. Dalam sejarah dan tradisi India, peran wanita memang direndahkan, seperti yang ditulis ahli India Renate Syed dari Universitas Ludwig-Maximilian di München. Dalam bukunya "Ein Unglück ist die Tochter" (Sialnya Anak Wanita), ia meneliti diskriminasi terhadap wanita di India pada masa dulu dan masa modern.

Dari hasil penelitiannya, Tradisi di India beranggapan bahwa wanita sejak dulu dilihat sebagai milik kaum pria. Hanya pria yang dianggap sebagai makhluk yang punya bijaksana. Wanita dianggap tidak bijaksana. Karena itu, orang menganggap wanita harus diawasi oleh pria. Hal ini masih terlihat sampai sekarang di India. Wanita tidak diijinkan membangun identitasnya sendiri. Wanita selalu dilihat sebagai anak atau istri dari seorang pria sehingga otonomi kebebasan mereka di ambil.

Ada alasan lain mengapa wanita mengalami diskriminasi dalam masyarakat di negara tersebut. Dalam tradisi Hindu di India, orang tua yang mengawinkan seorang anak wanita harus membayar uang cukup banyak. Keluarga pengantin wanita akan kehilangan muka, kalau tidak mampu

menyediakan uang ini. Karena itu bagi banyak keluarga, anak wanita dilihat sebagai beban keuangan. Terutama di negara bagian Punjab dan Haryana sering terjadi pengguguran kandungan, jika diketahui bahwa anak yang dikandung adalah wanita. Pengguguran kandungan seperti ini sebenarnya sudah dilarang, tapi masih tetap terjadi secara luas.

Selain itu, akses pendidikan bagi kaum wanita di India pun masih tergolong rendah. Data dari UN Women menunjukkan bahwa terdapat selisih sebesar 23% antara wanita dan pria untuk dapat mengakses internet di negara-negara berkembang termasuk India (UN Women, 2010). Diskriminasi terhadap wanita sudah terjadi di usia sangat muda. Banyak ibu yang menyusui anak pria lebih lama daripada anak wanita. Jika satu keluarga memiliki banyak anak, maka pendidikan anak pria yang diutamakan.

Selain pendidikan, masalah mengenai kekerasan seksual pun masih tergolong sangat tinggi di India. Data dari National Crime Record Bureau menunjukkan bahwa terjadi peningkatan pelaporan kasus kekerasan seksual pada dari tahun ke tahun.

Tercatat ada tahun 2011 terdapat pelaporan kasus pemerkosaan sebanyak 24.206 dengan kasus terbanyak terjadi di wilayah New Delhi. Kemudian pada tahun 2012 kasus pemerkosaan meningkat menjadi 24.923 kasus. Di tahun 2013, lonjakan tinggi pelaporan kasus pemerkosaan yang tadinya 24.923 kasus menjadi 33.707 (NCRB, 2015). Lonjakan pelaporann kasus pemerkosaan pada tahun 2013 tersebut disebabkan oleh beberapa faktor penting. Salah satunya adalah kasus

pemeriksaan Nirbhaya pada tahun 2012 yang menggemparkan bukan hanya wilayah negara India, tetapi juga seluruh dunia Internasional..

Jyoti Singh Pandey atau yang lebih dikenal luas sebagai Nirbhaya adalah korban pemerkosaan brutal yang terjadi di India pada 12 Desember 2013. Saat itu korban yang ditemani oleh seorang teman lelakinya, Awindra Pandey sedang dalam perjalanan pulang menggunakan bus ke Delhi. Di bus itulah Nirbhaya secara brutal diperkosa oleh supir bus dan enam orang pemuda secara bergiliran. Temannya Jyoti sendiri dipukul hingga pingsan. Selain diperkosa, seorang pelaku kemudian memasukkan sebatang besi berkarat ke kemaluan korban. Setelah selesai memerkosa korban, Jyoti dan temannya dilemparkan dari bus dan baru mendapatkan pertolongan tiga jam kemudian. Korban akhirnya meninggal dunia tiga belas hari setelah kejadian tersebut.

Kendati kasus pemerkosaan sudah seringkali terjadi di India (data dari National Crime Record Beurau India menyebutkan bahwa terjadi kasus pemerkosaan setiap duapuluh menit sekali), namun kasus Jyoti Singh diatas menyita perhatian dunia Internasional. UN for Human Rights mengecam perbuatan tersebut dalam pernyataan terbuka ang disampaikan oleh Ms Navi Pillay selaku High Comissioner UNHR. (UNHR, 2012)

. Pemerintah India sebenarnya sudah berusaha mengubah tradisi bahwa perempuan itu adalah kelas kedua serta mencoba untuk menanggulangi masalah kekerasan seksual ini. Di sekolah-sekolah negeri, anak wanita dibebaskan dari uang sekolah. Menurut sensus tahun 2011, sudah ada kemajuan. Tingkat buta aksara di

kalangan wanita India mencapai 65,4 persen pada tahun 2001. Menurut data aktual, angka itu sudah turun menjadi 48 persen. (UN Women Asia and Pacific, 2011) Aktivis wanita Urvashi Bhutalia melihat sudah ada perkembangan positif di India. Setelah kasus perkosaan Desember 2012, muncul diskusi luas tentang situasi wanita. Namun hal tersebut belum dapat secara efektif mengurangi jumlah diskriminasi wanita di India.

Wanita, disamping anak-anak merupakan agen utama untuk mencapai perubahan baik di lingkungan sosial, ekonomi, lingkungan yang nantinya dibutuhkan untuk pembangunan berkelanjutan. Akan tetapi keterbatasan akses ke layanan kesehatan dan pendidikan merupakan satu diantara banyak adalah di antara banyak tantangan yang mereka hadapi, yang diperparah oleh pangan global dan krisis ekonomi dan perubahan iklim. Memastikan pemberdayaan mereka adalah kunci tidak hanya untuk kesejahteraan individu, keluarga dan masyarakat pedesaan, tetapi juga untuk produktivitas ekonomi secara keseluruhan, mengingat kehadiran besar wanita dalam angkatan kerja pertanian di seluruh dunia.

Wanita khususnya wanita-wanita di pedesaan India memerlukan waktu yang lebih banyak untuk bekerja dibandingkan dengan wanita di lingkungan perkotaan. Sebuah studi yang mengambil contoh kasus di India menunjukkan bahwa wanita perlu menghabiskan setidaknya delapan jam per hari untuk mendapatkan air bersih. Berbeda dengan laki-laki yang hanya memerlukan waktu enam jam, dan anak-anak yang memerlukan waktu empat jam. (BBC, 2016)

Petani perempuan mengolah tanah kurang dari laki-laki, dan juga memiliki akses terbatas ke sumber benih, kredit tani, maupun penyuluhan. Kurang

dari 20 persen dari pemilik tanah adalah perempuan. (BBC, 2016) Perbedaan gender dalam akses terhadap tanah ternyata mempengaruhi kemampuan relatif dari petani dan pengusaha perempuan dan laki-laki untuk berinvestasi, beroperasi dan memanfaatkan peluang untuk perkembangan ekonomi baru.

India masih menjadi salah satu negara dengan tingkat penduduk buta huruf tinggi di dunia. Pada tahun 1991, sebesar empat puluh persen dari total populasi perempuan di India yang saat itu berjumlah 220 juta menderita buta huruf. Hal tersebut membawa dampak negatif seperti perempuan yang menjadi ketergantungan pada perekonomian keluarga dan negara. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa perempuan buta huruf memiliki tingkat fertilitas dan mortalitas yang tinggi, miskin status gizi, potensi penghasilan rendah, dan sedikit otonomi jika nantinya mereka berumah tangga. Akses ke pendidikan yang rendah yang sebagian besar dialami oleh perempuan India juga memiliki dampak negatif pada kesehatan dan kesejahteraan dari anak-anaknya. Misalnya, baru-baru ini survei di India menemukan bahwa terdapat 100 kematian bayi per 1000 kelahiran pada Ibu yang buta huruf. Hal ini jauh sekali dengan kematian 30 bayi per 1000 kelahiran pada Ibu yang mendapatkan akses pendidikan hingga bangku sekolah menengah atas. (Velkoff, 1998)

Beberapa tahun belakangan memang telah terjadi peningkatan akan pentingnya kesadaran gender dan kaitannya dengan masalah kemiskinan di dunia. Namun hal tersebut nyatanya belum dapat mengurangi jumlah orang yang miskin. Salah satu hal yang dapat merubah keadaan tersebut adalah dengan memotong

beberapa akar permasalahan yaitu diskriminasi gender, yang menjadi beban yang tidak proporsional pada wanita.

Ketika perempuan miskin, maka hak-hak mereka menjadi tidak terlindungi. Perempuan akan menjumpai permasalahan-permasalahan yang jarang mereka temui dan sulit untuk ditanggulangi. Hal ini menyebabkan perampasan hak-hak perempuan dari hidup mereka sendiri, hilangnya kesempatan untuk mengakses jalan ke lingkungan sosial yang lebih luas, dan juga menurunnya produktivitas perempuan yang sebenarnya sangat berpengaruh terhadap dinamika ekonomi.

Meskipun laki-laki maupun perempuan berada dalam situasi kemiskinan yang sama, diskriminasi gender disini berarti bahwa akses yang ada bagi perempuan sangatlah terbatas apabila dibandingkan dengan akses yang didapatkan oleh kaum laki-laki. Perempuan cenderung mempunyai akses yang lebih terbatas ke pelayanan kesehatan. Akses terbatas untuk jenis pekerjaan atau untuk memulai sebuah usaha mandiri. Beberapa bahkan berakhir ke dalam kekerasan sosial. Dan meskipun populasi perempuan lebih besar daripada laki-laki, akses politik perempuan pun masih sangat terbatas. Suar-suara mereka jarang didengar dan jarang ada keputusan politik yang mampu menguntungkan kaum perempuan. Proses advokasi yang dilakukan oleh NGO terkait Penanggulangan Kekerasan Seksual di India dapat dikatakan membuahkan hasil. Meskipun hasil yang ada belum terlalu signifikan akan tetapi ada perubahan yang terlihat dari presentase pelapor kasus kekerasan seksual kepada pihak kepolisian India.

Sebelum disahkannya Criminal Law Amandement Act pada tahun 2013, tidak di definisikan secara konstitusional apa itu tindakan perkosaan dan hukum yang dijatuhkan pun masih tergolong ringan. Akan tetapi setelah adanya amandemen pada tahun 2013, di definisikan secara jelas apa itu perkosaan dan hukuman yang di berikan pun bisa sampai hukuman mati. Grafik yang semakin meningkat dari tahun 2011 sampai tahun 2015, apalagi terdapat lonjakan yang sangat signifikan di tahun 2013 menunjukkan bahawa perempuan di India berani melaporkan kasus kekerasan seksual yang menimpa mereka.

Sebuah survey yang dilakukan oleh CSR pada tahun 2015 lalu, menyatakan bahwa 76,6% wanita di India berani melaporkan kasus kekerasan seksual apabila hal itu terjadi pada mereka di masa yang akan datang. (CSR, 2015).

Pemerintah India selama ini memang telah melakukan berbagai upaya untuk menurunkan angka diskriminasi gender di India terutama dalam kasus kekerasan seksual. Akan tetapi para aktivis NGO di negara tersebut menilai hal itu belum cukup karena fakta di lapangan menunjukkan bahwa kasus kekerasan seksual masih sering terjadi. Pada akhirnya, lahirnya Criminal Law Amandement Act pada tahun 2013 tersebut tidak lepas dari upaya NGO di India dalam mensosialisasikan nilai-nilai kesetaraan gender, perumusan tuntutan kebijakan, dsb. Akan lebih jauh dipaparkan dalam skripsi ini mengenai para NGO yang berperan dalam penanggulangan kasus kekerasan seksual di India. Selain itu akan dipaparkan pula mengenai proses-proses advokasi yang dilakukan sehingga



dampak positif dari advokasi NGO tersebut bisa di rasakan oleh masyarakat India khususnya kaum perempuan mereka.

Dari latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang topik bahasan dengan judul ***“Proses Advokasi NGO dalam Penanggulangan Masalah Kekerasan Seksual di India Pasca Kasus Nirbhaya.”***

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut **“Bagaimana proses advokasi NGO dalam menanggulangi permasalahan kekerasan seksual di India pasca kasus Nirbhaya?”**

## **C. LANDASAN TEORI**

Teori adalah serangkaian variabel, definisi, dan bentuk pernyataan yang saling berhubungan yang kemudian menghadirkan sebuah pandangan sistematis mengenai fenomena tertentu. (Cresweel, 1993) Dalam membahas permasalahan yang muncul tersebut, teori dapat digunakan untuk menjawab pertanyaan dari rumusan masalah. Selain teori, dapat juga digunakan konsep maupun model. Dalam pembahasan skripsi ini, penulis menggunakan Model Advokasi Segitiga Koordinasi.

Menurut Roem Tomatimasang, Mansour Fakh, dan Toto Raharjo dalam buku Merubah Kebijakan Publik (Tomatimasang, Fakh, & Toto, 2000), advokasi merupakan sebuah upaya untuk memperbaiki atau

merubah kebijakan publik agar sesuai dengan kehendak atau kepentingan mereka yang mendesakkan terjadinya perubahan tersebut. Advokasi bukan proses revolusi yang bertujuan untuk merebut kekuasaan politik kemudian melakukan perubahan secara menyeluruh pada sistem dan struktur kemasyarakatan. Berbeda dengan revolusi, advokasi merupakan proses untuk merubah kebijakan publik secara bertahap. Advokasi adalah sebuah proses yang di dalamnya terdapat sejumlah aktivitas yang ditujukan untuk mempengaruhi pembuatan keputusan. *Advocacy is the pursuit of influencing outcomes — including public-policy and resource allocation decisions within political, economic, and social systems and 11 institutions — that directly affect people's current lives* (Cohen, De La Vega, & Watson, 2001).

Advokasi hanyalah salah satu dari proses demokrasi yang dapat dilakukan oleh warga negara untuk mengawasi dan melindungi kepentingan mereka dalam kaitannya dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Kegiatan advokasi bergerak pada semua jenis dan proses pembentukan kebijakan publik yang jadi sasarannya sehingga kegiatan advokasi memerlukan keterlibatan banyak pihak dengan spesifikasi keahlian yang berbeda-beda tetapi terorganisir secara sistematis.

Kegiatan advokasi bergerak pada semua jenis dan proses pembentukan kebijakan publik yang jadi sasarannya sehingga kegiatan advokasi memerlukan keterlibatan banyak pihak dengan spesifikasi keahlian yang berbeda-beda tetapi terorganisir secara sistematis. Kegiatan advokasi, baik ditingkat lokal, nasional maupun internasional melibatkan berbagai pihak/organisasi yang dapat digambarkan dalam segitiga koordinasi sebagai berikut:



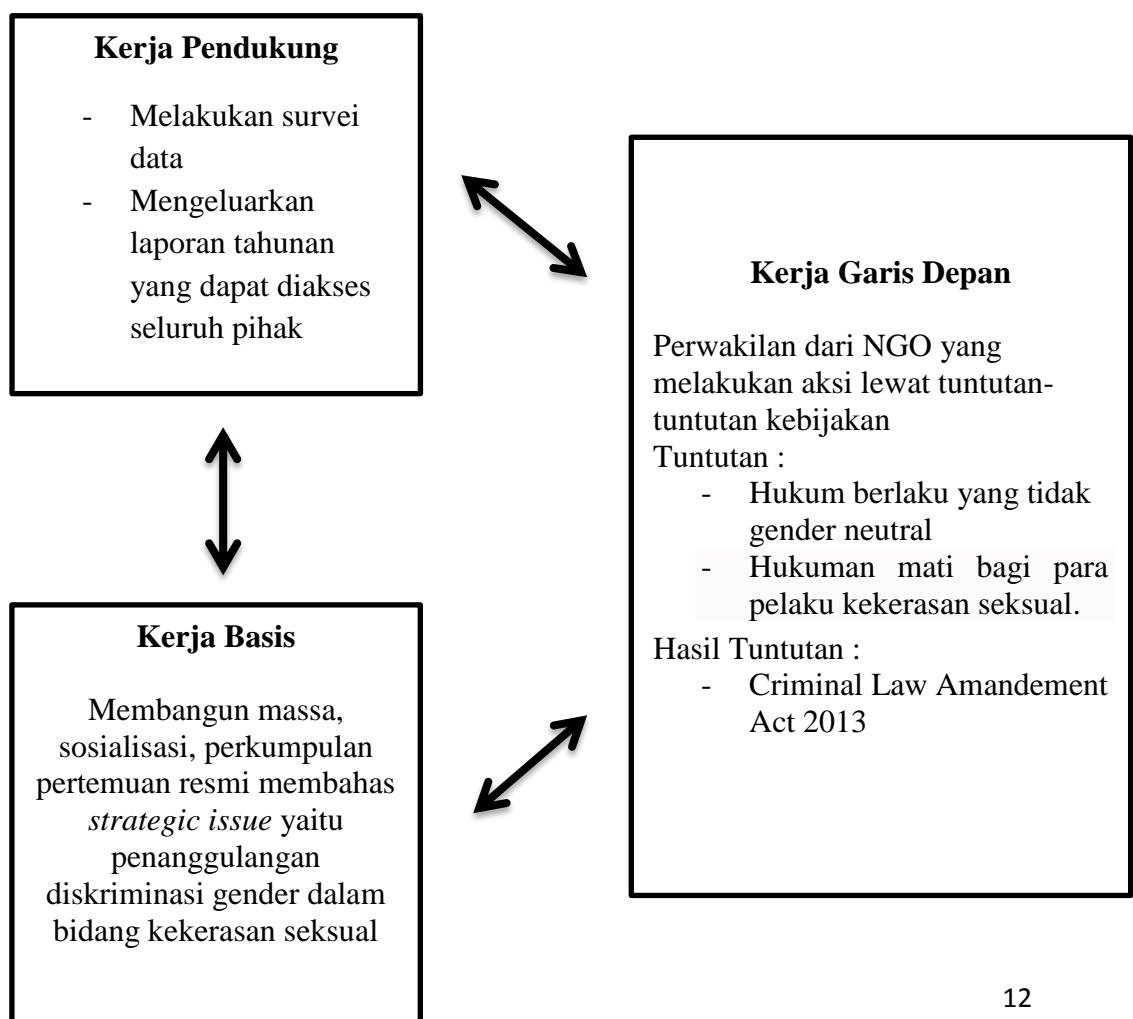
Gambar 1.1 Model Advokasi  
Segitiga Koordinasi

Tampak dalam bagan diatas yaitu Model Advokasi Segitiga Koordinasi, bahwa kegiatan advokasi memerlukan banyak pihak untuk menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing. Advokasi memang sejatinya melibatkan banyak pihak atau aktor (kelompok-kelompok aksi) yang bertindak sebagai penggalan gerakan advokasi. Pihak-pihak tersebut bertugas untuk melakukan mobilisasi massa, pihak yang bertindak sebagai penyedia data, pihak yang bertindak sebagai penyedia

dana, pihak yang terlibat dalam proses legeslasi maupun pihak yang bertindak sebagai juru bicara dan lobi yang akan membentuk sebuah jaringan gerakan advokasi. (Azizah, 2014)

Langkah-langkah advokasi yang dilakukan oleh NGO di India juga tidak luput dari keterlibatan banyak pihak yang terorganisir secara sistematis dan saling berhubungan seperti yang digambarkan oleh Model Advokasi Segitiga Koordinasi di atas. Keterlibatan aktor-aktor ini penting dalam rangka terwujudnya kebijakan publik yang diharapkan oleh NGO yang melakukan advokasi-advokasi terhadap pemerintah. Adapun langkah advokasi yang dilakukan oleh NGO di India secara ringkas dapat dilihat dalam bagan dibawah ini :

Gambar 1.2 Implementasi Model Advokasi Segitiga Koordinasi



Kegiatan advokasi memang memerlukan proses yang cukup panjang. Diperlukan waktu, dana, dan juga tenaga yang sangat banyak untuk dapat merubah sebuah kebijakan negara agar sesuai dengan hal atau isu yang kita perjuangkan. Di India sendiri, NGO yang bergerak dalam bidang penghapusan diskriminasi gender telah tahun menahun berjuang untuk mengupayakan kehidupan yang lebih layak bagi kaum perempuan disana. Dalam skripsi ini akan dibahas lebih lanjut mengenai proses-proses ataupun langkah-langkah advokasi yang dilakukan oleh para NGO tersebut.

#### **D. HIPOTESA**

Berdasarkan Model Advokasi di atas maka dapat ditarik dugaan atas Proses Advokasi yang dilakukan oleh para NGO dalam rangka menanggulangi masalah Kekerasan Seksual di India pasca kasus Nirbhaya di antaranya adalah dengan :

1. Melakukan survei data dan pendanaan terkait program-program yang dijalankan
2. Melakukan berbagai macam sosialisasi dan kampanye dalam bentuk workshop kepada warga negara India dengan isu strategis yaitu kekerasan seksual
3. Bekerjasama dalam merumuskan tuntutan-tuntutan kebijakan yang *non-gender biased* untuk kemudian ditujukan kepada pemerintah India

## **E. TUJUAN PENELITIAN**

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Memberikan pengetahuan mengenai proses advokasi NGO dan hal-hal apa saja yang telah dilakukan oleh aktor-aktor tersebut di India dalam rangka menanggulangi masalah diskriminasi gender dalam bidang kekerasan seksual.
2. Memberikan pengetahuan mengenai kasus diskriminasi gender khususnya kekerasan seksual pada perempuan yang terjadi di negara India.
3. Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat penulis untuk memperoleh gelar sarjana S1 dari Jurusan Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

## **F. JANGKAUAN PENELITIAN**

Untuk membatasi pembahasan dalam skripsi ini maka dirasa perlu untuk membuat batasan dalam pembahasan atau batasan penelitian. Karena peran NGO sebagai organisasi internasional sangatlah luas, maka bahasan topik pada skripsi ini adalah Proses Advokasi NGO dalam isu di kekerasan seksual. Sedangkan batasan jangkauan wilayah yang digunakan dalam penelitian adalah negara India dengan jangkauan waktu pasca kasus Nirbhaya pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2017.

## **G. METODE PENELITIAN**

Dalam kepenulisan riset ini menggunakan studi kepustakaan dengan menggali literatur dari berbagai sumber baik melalui buku, jurnal, surat kabar, artikel, dokumen pemerintah, ataupun berbagai sumber online termasuk *official website*. Untuk menganalisa kasus penulis menggunakan Model Advokasi Setiga Koordinasi.

## **H. SISTEMATIKA PENULISAN**

- BAB I : Mencakup latar belakang, rumusan masalah, kerangka teoritik, hipotesis, tujuan penelitian, jangkauan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.
- BAB II : Menjabarkan tentang contoh-contoh NGO penting yang bergerak untuk menanggulangi kekerasan seksual di India.
- BAB III : Membahas tentang apa itu Kekerasan Seksual. Dijabarkan pula fakta-fakta mengenai kekerasan seksual di India.
- BAB IV : Analisis mendalam mengenai proses advokasi NGO sebagai upaya untuk menanggulangi kekerasan seksual di India. Akan dijelaskan bagaimana proses Advokasi NGO kepada pemerintah India.
- BAB V : Bab ini merupakan penutup yang berisi kesimpulan.